



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TAJUDDIN**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENERIMAAN**
3. NHK : **934489**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/1.260 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/70 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/70 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/70 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 50.000.000

1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOTOR, YAMAHA YAMAHA FINO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, YAMAHA YAMAHA LEXI Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 5.400.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 21.100.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----



Sub Total	Rp.	2.426.500.000
III. HUTANG	Rp.	330.476.007
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.096.023.993

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.